

FORMULIR PERMOHONAN

KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK)

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Sleman :

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan KRK

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman
di Sleman

Kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang di Kabupaten Sleman, dengan data sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

A. PERORANGAN / BADAN

1. Nama /Direktur /Pengurus :
2. NIK :
3. Alamat Lengkap :
4. No.Telp / WA aktif :
5. Jabatan :
6. Badan/PT/Kop :
7. Nomor dan Tanggal :
 - a. Akta Pendirian :
 - b. Akta Perubahan Terakhir :
8. Kedudukan Badan di :
9. NIB OSS RBA :
10. NPWP :
11. NPWP.Daerah :
12. Email aktif :

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN

1. Data Kegiatan Usaha
 - 1) Kegiatan Usaha :
 - 2) Nama Usaha :
 - 3) KBLI :
 - 4) Modal Usaha :
2. Koordinat/Polygon dan KMZ :
3. Luas Tanah dipergunakan : M²
4. Lokasi :
 - a. Nomor/Jalan :
 - b. Padukuhan :,RT:.....,RW:.....
 - c. Kalurahan :
 - d. Kapanewon :
5. Bukti Hak Atas Tanah Yang Dipergunakan
 - a. Status & nomor hak atas tanah;
 - 1).SHM/HGB/Hak Pakai *)
 - Nomor :
 - Surat Ukur/G.Situasi :

2).SHM/HGB/Hak Pakai *)

Nomor :

Surat Ukur/G.Situasi :

3).SHM/HGB/Hak Pakai *)

Nomor :

Surat Ukur/G.Situasi :

(Diisi Sesuai Dengan jumlah Bukti Hak Atas Tanah Yang Dipergunakan)

b. Status penggunaan : Milik sendiri/sewa/kerjasama/pinjam pakai*)

c. Kondisi tanah : sawah/tegal/darat/pekarangan/*)

6. Batas Tanah

1) Utara : (nama pemilik tanah)

2) Selatan : (nama pemilik tanah)

3) Barat : (nama pemilik tanah)

4) Timur : (nama pemilik tanah)

III. LAMPIRAN PERSYARATAN UPLOAD

1. Formulir dan Pakta Integritas bermeterai cukup
2. KTP Elektronik pemohon/Penanggunjawab;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
4. Akta Badan Hukum/Usaha, (**apabila pemohon berbentuk badan**)
5. Dokumen/Bukti hak atas tanah ;
6. Surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, (**apabila pemohon bukan pemilik tanah**);
7. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan beserta surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir,
8. Gambar situasi tanah/site pada sertifikat dan diberi keterangan ukuran panjang, lebar (gambar sesuai dengan bukti di dokumen hak atas tanah/sertifikat tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan.
9. Nomor Induk Berusaha dari OSS RBA;
10. Peta polygon lokasi kegiatan (bidang tanah) pada aplikasi google earth dalam file KMZ
 - a) Syarat no.1 sd 9 dijadikan 1 file format **pdf**
 - b) Syarat no.10 dalam format **kmz**
 - Syarat a dan b dijadikan satu dalam bentuk ZIP dan diupload sesuai aslinya. (bukan hasil foto hp tidak diperkecil/diperbesar);

Pemohon,

(.....)

**PAKTA INTEGRITAS
PENGURUSAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :
Jabatan dalam lembaga/ institusi :
Nama lembaga/ institusi :
Alamat :

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Kabupaten Sleman, saya menyatakan bersedia untuk:

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Kabupaten Sleman, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Kabupaten Sleman;
2. Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
3. Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
6. Sanggup/sudah^(*) mengikutsertakan pekerja dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
7. Apabila saya tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan, saya bersedia menerima pembinaan dan pengawasan serta sanksi dari pejabat yang berwenang.
8. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Saya yang membuat
Pernyataan,

Meterai Rp 10.000,-
Stempel Perusahaan

.....